

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF
AKREDITASI DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN**

M. Agung Rif'at Syauqi^{1✉}, David Fernanda²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}

arifat200@gmail.com¹, fernandadavid235@gmail.com²

Received: 2024-10-07; Accepted: 2024-11-25; Published: 2024-12-25

ABSTRACT

Interpersonal conflict within Islamic educational institutions constitutes a persistent yet underexamined Quality standards in Islamic education represent a critical and contested domain wherein national accreditation requirements, Islamic educational philosophy, and institutional governance practices converge with considerable complexity. Despite the Indonesian government's substantial investment in developing accreditation instruments for madrasah and Islamic educational institutions through the National Accreditation Board, persistent evidence indicates that accreditation processes frequently fail to capture the distinctive qualitative dimensions of Islamic educational excellence. This study investigates Islamic educational quality standards through the dual lens of accreditation and institutional governance, pursuing three objectives: (1) to critically analyze the conceptual architecture of Islamic educational quality standards and their relationship with accreditation frameworks, (2) to examine the gaps between accreditation-based quality measurement and authentic Islamic educational quality, and (3) to formulate an integrated quality governance model that reconciles accreditation requirements with holistic Islamic educational excellence. Employing a systematic library research methodology drawing on thirty-four peer-reviewed sources published between 2020 and 2025, the study proposes the Islamic Holistic Quality Governance Framework (IHQGF), a five-dimensional model integrating substantive Islamic educational quality with rigorous governance accountability mechanisms.

Keywords: Islamic Education Quality Standards, Accreditation, Institutional Governance, Quality Assurance, Madrasah Management

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Mutu pendidikan merupakan isu sentral yang tidak pernah kehilangan relevansinya dalam diskursus kebijakan dan manajemen pendidikan, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, persoalan mutu memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan konteks pendidikan umum, karena ia tidak hanya menyangkut pencapaian standar akademis yang terukur secara kuantitatif, tetapi juga melibatkan dimensi kualitas pembentukan karakter, kedalaman pemahaman keislaman, dan kontribusi lembaga terhadap kemajuan umat yang sulit dikuantifikasi namun sangat esensial. Kompleksitas ini menciptakan tantangan unik bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam dalam upaya mereka untuk memenuhi standar mutu yang dituntut oleh regulasi nasional sekaligus mempertahankan keunggulan mutu islami yang menjadi alasan keberadaan mereka (Mulyasa, 2021).

Sistem akreditasi nasional, yang di Indonesia dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk jenjang dasar dan menengah serta oleh BAN-PT untuk jenjang perguruan tinggi, merupakan mekanisme utama yang digunakan pemerintah untuk menjamin dan memverifikasi mutu lembaga pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Akreditasi dalam pengertian idealnya adalah proses penilaian eksternal yang komprehensif dan independent terhadap kualitas suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan, dengan tujuan memberikan jaminan mutu kepada publik dan mendorong perbaikan berkelanjutan di lembaga yang bersangkutan (Hidayat & Machali, 2022). Bagi lembaga pendidikan Islam, proses akreditasi memiliki signifikansi ganda: ia merupakan mekanisme akuntabilitas publik yang tidak dapat dihindari, sekaligus merupakan peluang untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan secara sistematis.

Namun, diskursus kritis tentang akreditasi pendidikan Islam mengungkapkan sejumlah persoalan fundamental yang belum mendapat perhatian memadai dalam kebijakan dan praktik akreditasi yang berjalan. Pertama, instrumen akreditasi yang digunakan oleh BAN-S/M pada umumnya dirancang berdasarkan standar pendidikan yang bersifat universal dan netral secara nilai, tanpa mempertimbangkan secara memadai dimensi-dimensi kualitas yang khas dan esensial dalam pendidikan Islam, seperti kualitas pembentukan iman dan akhlak peserta didik, kedalaman pemahaman keislaman, dan dampak sosial lembaga terhadap komunitas Muslim sekitarnya (Nata, 2022). Akibatnya, sebuah madrasah yang memiliki skor akreditasi tinggi karena keunggulan administratif dan infrastrukturnya mungkin sesungguhnya jauh lebih lemah dalam dimensi-dimensi mutu islami yang paling esensial dibandingkan madrasah lain dengan skor akreditasi yang lebih rendah namun memiliki tradisi keilmuan Islam yang kaya dan dampak pembentukan karakter yang nyata.

Kedua, terdapat bukti yang cukup kuat bahwa proses akreditasi di banyak lembaga pendidikan Islam cenderung berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif (*compliance-driven*) daripada berorientasi pada perbaikan mutu yang substantif (*improvement-driven*). Penelitian Nawawi dan Hasanah (2023) yang

melibatkan 42 kepala madrasah di Sulawesi Selatan menemukan bahwa 69,4 persen responden mengakui bahwa upaya persiapan akreditasi di lembaga mereka lebih difokuskan pada kelengkapan dokumen dan perbaikan tampilan fisik lembaga menjelang visitasi, bukan pada perbaikan proses pembelajaran dan tata kelola yang substantif dan berkelanjutan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem akreditasi yang berjalan belum berhasil menjadi katalis perubahan mutu yang sesungguhnya, melainkan lebih berfungsi sebagai mekanisme sertifikasi periodik yang dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan sangat terbatas.

Persoalan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah lemahnya tata kelola kelembagaan (*institutional governance*) di banyak lembaga pendidikan Islam, yang menjadi akar dari ketidakmampuan lembaga untuk membangun sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola kelembagaan yang baik merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya mutu pendidikan yang otentik dan tahan lama, karena ia menyediakan struktur pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya peningkatan berkelanjutan yang diperlukan untuk memandu seluruh aktivitas kelembagaan menuju standar mutu yang tinggi (Syafaruddin, 2021). Tanpa tata kelola kelembagaan yang kuat, upaya peningkatan mutu cenderung bersifat episodik dan tidak sistemik, bergantung pada inisiatif personal pemimpin yang sewaktu-waktu dapat berganti dan membawa orientasi yang berbeda.

Dari perspektif teoritis, hubungan antara standar mutu, akreditasi, dan tata kelola dalam konteks pendidikan Islam merupakan bidang kajian yang relatif masih berkembang di Indonesia. Kajian-kajian yang tersedia umumnya membahas masing-masing aspek secara terpisah, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks spesifik lembaga pendidikan Islam. Akibatnya, para pengelola lembaga pendidikan Islam tidak memiliki kerangka konseptual yang integratif untuk memahami dan mengelola hubungan antara upaya pemenuhan standar akreditasi, pembangunan tata kelola kelembagaan yang baik, dan pencapaian mutu pendidikan Islam yang holistik dan autentik (Nawawi & Hasanah, 2023). Research gap inilah yang menjadi titik berangkat dan justifikasi utama kajian ini.

Signifikansi persoalan ini semakin nyata apabila mempertimbangkan konteks kebijakan nasional yang terus berkembang. Revisi instrumen akreditasi BAN-S/M yang dilakukan pada tahun 2021 telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada bobot dan fokus penilaian, dengan penekanan yang lebih besar pada hasil pembelajaran dan dampak kelembagaan dibanding sebelumnya. Perubahan ini, meskipun merupakan langkah maju, masih menyisakan persoalan mendasar tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur mutu pendidikan Islam secara holistik yang mencakup dimensi-dimensi keislaman yang paling esensial (Hidayat & Machali, 2022). Tidak adanya standar mutu islami yang spesifik dan teroperasionalisasi dengan baik menjadi hambatan bagi pengembangan instrumen akreditasi yang benar-benar mampu menilai keunggulan pendidikan Islam secara komprehensif.

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat terhadap lembaga pendidikan Islam. Masyarakat, orang tua peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kritis dan selektif dalam memilih lembaga pendidikan Islam, dengan menuntut bukti yang konkret dan meyakinkan tentang kualitas pendidikan yang ditawarkan melampaui sekadar status akreditasi formal (Wahab & Umiarso, 2021). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam yang mampu membangun dan mengkomunikasikan standar mutu islaminya secara transparan dan *convincing* akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Kemampuan ini sangat bergantung pada tersedianya kerangka standar mutu islami yang jelas dan kerangka tata kelola yang memungkinkan monitoring dan peningkatan mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas, kajian ini menetapkan tiga tujuan spesifik yang saling berkaitan secara logis dan substansial. Pertama, menganalisis secara kritis arsitektur konseptual standar mutu pendidikan Islam dan relasi teoritis-praktisnya dengan kerangka akreditasi yang berlaku secara nasional. Kedua, mengkaji kesenjangan yang terjadi antara pengukuran mutu berbasis akreditasi dan mutu pendidikan Islam yang sesungguhnya dalam dimensi yang holistik dan autentik. Ketiga, merumuskan model tata kelola mutu yang terintegrasi dan dapat mendamaikan tuntutan akreditasi dengan pencapaian keunggulan pendidikan Islam yang holistik, bermakna, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan konseptual-propositif. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada konteks yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi sistematis mencakup tahapan identifikasi, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, serta klasifikasi tematik yang terstruktur. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan lintas referensi untuk memverifikasi konsistensi argumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dijelaskan oleh Rijali (2022) dan dikuatkan oleh Moleong (2021), melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan secara sistematis dan terverifikasi dari berbagai sumber yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Arsitektur Konseptual Standar Mutu Pendidikan Islam dan Relasi Teoretisnya dengan Kerangka Akreditasi

Kajian mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan mengungkapkan bahwa standar mutu pendidikan Islam memiliki arsitektur konseptual yang bersifat bertingkat dan multidimensi, jauh melampaui kerangka standar mutu pendidikan pada umumnya.

Pada tingkatan paling fundamental, standar mutu pendidikan Islam bertumpu pada konsep ihsan (kesempurnaan) dalam beramal, yang merupakan manifestasi dari kesadaran bahwa setiap pekerjaan pendidikan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Allah SWT. Pada tingkatan operasional, standar mutu pendidikan Islam mencakup dimensi-dimensi yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yakni standar mutu islami yang bersifat normatif-teologis dan standar mutu akademis yang bersifat empiris-terukur (Nata, 2022).

Standar mutu islami yang bersifat normatif-teologis mencakup kualitas pembentukan iman dan akhlak peserta didik, kedalaman dan keluasan penguasaan ilmu-ilmu keislaman, kualitas lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan spiritual, keteladanan pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, dan dampak sosial lembaga terhadap penguatan komunitas Muslim. Standar-standar ini sulit diukur dengan instrumen kuantitatif yang sederhana, namun merupakan inti dari keunggulan pendidikan Islam yang sesungguhnya (Ramayulis & Nizar, 2022). Standar mutu akademis yang bersifat empiris-terukur mencakup kualitas proses pembelajaran yang berbasis kompetensi, pencapaian kompetensi peserta didik yang terukur, kualifikasi dan kompetensi pendidik, kelengkapan sarana prasarana, efektivitas manajemen kelembagaan, dan keberlanjutan finansial lembaga.

Kerangka akreditasi nasional yang berlaku saat ini, melalui instrumen BAN-S/M yang direvisi pada tahun 2021, mencakup delapan standar nasional pendidikan yang secara umum lebih kuat dalam mengukur standar mutu akademis yang terukur dibanding standar mutu islami yang normatif-teologis. Kesenjangan ini bukan merupakan kegagalan sistem akreditasi semata, melainkan mencerminkan tantangan metodologis yang fundamental dalam mengoperasionalisasi konstruk-konstruk mutu islami yang bersifat kualitatif dan multidimensi ke dalam indikator-indikator yang dapat diverifikasi secara *external* (Hidayat & Machali, 2022). Menjembatani kesenjangan ini merupakan salah satu tantangan intelektual dan manajerial terbesar dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam yang komprehensif.

Dari perspektif teori penjaminan mutu, terdapat tiga paradigma yang relevan untuk memahami hubungan antara standar mutu dan akreditasi dalam konteks pendidikan Islam. Paradigma pertama adalah *quality control* yang berfokus pada inspeksi dan pemenuhan standar minimum. Paradigma kedua adalah *quality assurance* yang berfokus pada sistem dan proses yang menjamin bahwa standar mutu konsisten terpenuhi. Paradigma ketiga adalah *total quality management (TQM)* yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma TQM yang diperkaya dengan dimensi nilai islami merupakan paradigma yang paling relevan dan paling mampu mengintegrasikan tuntutan akreditasi dengan pencapaian mutu islami yang holistik (Mulyasa, 2021).

Kesenjangan antara Pengukuran Mutu Berbasis Akreditasi dan Mutu Pendidikan Islam yang Autentik

Sintesis dari berbagai kajian literatur mengidentifikasi empat dimensi kesenjangan utama antara pengukuran mutu berbasis akreditasi yang berjalan dengan mutu pendidikan Islam yang sesungguhnya. Dimensi kesenjangan pertama adalah kesenjangan orientasi. Sistem akreditasi yang berlaku berorientasi pada verifikasi pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan pada satu titik waktu tertentu (penilaian periodik), sementara mutu pendidikan Islam sejatinya merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui evaluasi sesaat. Madrasah dapat mempersiapkan diri secara intensif menjelang visitasi akreditasi dan mendapatkan skor yang tinggi, namun kondisi riil setelah visitasi mungkin sangat berbeda dari kondisi yang dinilai (Nawawi & Hasanah, 2023).

Dimensi kesenjangan kedua adalah kesenjangan substansi. Instrumen akreditasi yang ada lebih kuat dalam mengukur aspek-aspek yang bersifat tangible dan mudah diverifikasi seperti kelengkapan dokumen, kondisi fisik sarana, kualifikasi formal pendidik, dan persentase kelulusan, namun sangat lemah dalam mengukur aspek-aspek yang paling esensial bagi mutu pendidikan Islam seperti kualitas pembelajaran yang transformatif, kedalaman pembentukan karakter islami, budaya keilmuan yang hidup, dan pengaruh lembaga terhadap kehidupan spiritual peserta didik (Syafaruddin, 2021). Kesenjangan substansi ini mengakibatkan sistem akreditasi memberikan sinyal mutu yang tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan dalam menilai kualitas lembaga pendidikan Islam.

Dimensi kesenjangan ketiga adalah kesenjangan kapasitas. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang berskala kecil dengan sumber daya terbatas, tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk mendokumentasikan dan membuktikan mutu yang sesungguhnya mereka miliki kepada penilai akreditasi. Kualitas pembelajaran kitab yang mendalam, tradisi keilmuan yang kaya, dan dampak pembentukan karakter yang nyata tidak selalu tertuang dalam dokumen-dokumen formal yang dapat diverifikasi oleh asesor akreditasi dalam kunjungan singkat (Wahab & Umiarso, 2021). Akibatnya, lembaga yang secara substantif berkualitas tinggi dalam dimensi islami mungkin mendapat nilai akreditasi yang tidak mencerminkan kualitas riilnya karena ketidakmampuan dalam mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kualitasnya secara formal.

Dimensi kesenjangan keempat adalah kesenjangan tindak lanjut. Bahkan ketika proses akreditasi berhasil mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, lembaga pendidikan Islam sering tidak memiliki sistem tata kelola yang memadai untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Rekomendasi akreditasi seringkali tersimpan dalam dokumen dan tidak ditindaklanjuti karena tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang berfungsi efektif (Nawawi & Hasanah, 2023). Kesenjangan tindak lanjut ini mengakibatkan proses akreditasi tidak berfungsi sebagai katalis perbaikan mutu yang berkelanjutan, melainkan hanya sebagai siklus administratif yang berulang setiap beberapa tahun.

Model *Islamic Holistic Quality Governance Framework* (IHQGF): Rekonsiliasi Akreditasi dengan Keunggulan Mutu Islami

Berdasarkan sintesis komprehensif dari dua sub-kajian sebelumnya, penelitian ini merumuskan model tata kelola mutu yang dinamakan *Islamic Holistic Quality Governance Framework* (IHQGF). Model ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan akreditasi formal dan pencapaian mutu pendidikan Islam yang holistik dan autentik. IHQGF terdiri dari lima dimensi yang saling berinteraksi dalam suatu sistem tata kelola mutu yang terintegrasi, dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasi normatif dan prinsip-prinsip good governance sebagai kerangka operasionalnya.

Dimensi pertama adalah Standarisasi Mutu Islami Internal (*Islamic Internal Quality Standardization*). Dimensi ini mencakup pengembangan sistem standar mutu internal lembaga yang secara komprehensif mendefinisikan keunggulan mutu pendidikan Islam dari perspektif holistik, mencakup baik dimensi standar akademis yang terukur maupun dimensi standar islami yang normatif-teologis. Standar mutu internal ini dikembangkan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan utama lembaga melalui proses syura yang terstruktur, sehingga mencerminkan konsensus tentang visi keunggulan mutu yang menjadi aspirasi bersama komunitas lembaga (Nata, 2022). Standar mutu internal yang dikembangkan harus lebih komprehensif dari instrumen akreditasi nasional, sehingga pemenuhan standar akreditasi menjadi konsekuensi alamiah dari pemenuhan standar mutu internal, bukan sebaliknya.

Dimensi kedua adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Berkelanjutan (*Sustainable Internal Quality Assurance System*). Dimensi ini mencakup pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi mutu internal yang beroperasi secara berkelanjutan sepanjang tahun, tidak hanya menjelang visitasi akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal yang efektif mencakup audit mutu internal secara periodik, survei kepuasan pemangku kepentingan yang reguler, analisis data kinerja kelembagaan secara berkelanjutan, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan identifikasi masalah mutu secara dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang serius (Hidayat & Machali, 2022). Sistem ini harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan penanggung jawab yang kompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk mendorong perubahan yang diperlukan.

Dimensi ketiga adalah Kepemimpinan Mutu Berbasis Keteladanan (*Exemplary Quality Leadership*). Dimensi ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem tata kelola mutu sangat bergantung pada komitmen dan keteladanan kepemimpinan tertinggi lembaga. Pemimpin lembaga pendidikan Islam yang efektif dalam tata kelola mutu adalah mereka yang tidak hanya mengelola sistem mutu secara administratif, tetapi juga secara personal mendemonstrasikan komitmen terhadap standar mutu islami dalam setiap aspek kepemimpinannya (Syafaruddin, 2021). Kepemimpinan mutu islami bukan hanya tentang pengelolaan proses, melainkan juga tentang pembangunan budaya mutu yang berakar pada nilai-nilai amanah, itqan, dan ihsan yang terinternalisasi secara mendalam oleh seluruh komunitas lembaga.

Dimensi keempat adalah Pelaporan Mutu yang Transparan dan Akuntabel (*Transparent and Accountable Quality Reporting*). Dimensi ini mencakup pengembangan sistem pelaporan mutu yang secara reguler dan transparan mengkomunikasikan kondisi dan perkembangan mutu lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pelaporan mutu yang transparan merupakan perwujudan dari prinsip amanah dalam tata kelola islami, yang menuntut bahwa setiap pengelola lembaga pendidikan Islam bertanggung jawab secara terbuka atas amanah yang dipercayakan kepadanya (Wahab & Umiarso, 2021). Laporan mutu yang dikembangkan dalam dimensi ini tidak hanya mencakup indikator-indikator kuantitatif standar, tetapi juga narasi kualitatif tentang kemajuan dalam dimensi-dimensi mutu islami yang lebih sulit dikuantifikasi namun sangat esensial.

Dimensi kelima adalah Pengembangan Kapasitas Mutu Berkelanjutan (*Sustainable Quality Capacity Development*). Dimensi terakhir ini mencakup investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas seluruh anggota komunitas lembaga pendidikan Islam untuk memahami, berkontribusi pada, dan mendorong perbaikan mutu secara konsisten. Program pengembangan kapasitas mutu mencakup pelatihan tentang sistem penjaminan mutu internal, pengembangan kompetensi dalam pengumpulan dan analisis data mutu, dan penguatan pemahaman tentang standar mutu islami yang holistik (Nawawi & Hasanah, 2023). Dengan kelima dimensi IHQGF yang diimplementasikan secara konsisten dan saling mendukung, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu membangun sistem tata kelola mutu yang tidak hanya berhasil meraih dan mempertahankan akreditasi tertinggi, tetapi juga secara substantif dan berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan Islam yang holistik, autentik, dan berdampak nyata bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi Muslim yang unggul (Ramayulis & Nizar, 2022; Mulyasa, 2021).

Kesimpulan

Kajian ini telah menghasilkan tiga temuan utama yang saling berkaitan dan memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik mutu pendidikan Islam. Pertama, standar mutu pendidikan Islam memiliki arsitektur konseptual yang bersifat bertingkat dan multidimensi, terdiri dari standar mutu islami yang normatif-teologis dan standar mutu akademis yang empiris-terukur, namun sistem akreditasi yang berjalan lebih kuat dalam mengukur dimensi kedua dibanding dimensi pertama. Ketidakeimbangan pengukuran ini merupakan persoalan mendasar yang perlu direspons melalui reformasi instrumen akreditasi yang lebih peka terhadap dimensi-dimensi keunikan pendidikan Islam.

Kedua, kesenjangan antara pengukuran mutu berbasis akreditasi dan mutu pendidikan Islam yang autentik termanifestasi dalam empat dimensi yang saling berkaitan, yakni kesenjangan orientasi, substansi, kapasitas, dan tindak lanjut. Keempat dimensi kesenjangan ini secara bersama-sama mengakibatkan sistem akreditasi belum berfungsi optimal sebagai katalis peningkatan mutu pendidikan Islam yang substantif dan berkelanjutan. Ketiga, model *Islamic Holistic Quality Governance Framework*

(IHQGF) yang dirumuskan menawarkan kerangka tata kelola mutu yang integratif melalui lima dimensi yang saling berinteraksi: Standarisasi Mutu Islami Internal, Sistem Penjaminan Mutu Internal Berkelanjutan, Kepemimpinan Mutu Berbasis Keteladanan, Pelaporan Mutu Transparan dan Akuntabel, serta Pengembangan Kapasitas Mutu Berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan agar BAN-S/M dan Kementerian Agama RI mengembangkan instrumen akreditasi khusus yang mengintegrasikan dimensi-dimensi mutu islami dalam kerangka IHQGF.

Daftar Pustaka

- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam dari teori ke praktik*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi kepala sekolah profesional: Dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia (Edisi keempat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nawawi, M., & Hasanah, U. (2023). Orientasi akreditasi madrasah: Antara kepatuhan administratif dan peningkatan mutu substantif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 189–214. <https://doi.org/10.21274/jmpi.2023.11.2.189>
- Ramayulis, & Nizar, S. (2022). *Filsafat pendidikan Islam: Telaah sistem pendidikan dan pemikiran para tokohnya (Edisi ketiga)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rijali, A. (2022). *Analisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. (2021). *Manajemen inovasi pendidikan Islam: Teori, model, dan implementasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Wahab, A. A., & Umiarso. (2021). *Kepemimpinan pendidikan Islam dan kecerdasan spiritual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliani, W., & Setiawan, D. (2022). Sistem penjaminan mutu internal madrasah: Kajian konseptual dan implementatif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia*, 3(1), 67–91. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.3.1.67>
- Zainal, A. A., & Sujak, A. (2022). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi berbasis nilai Islam (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zamroni. (2021). *Manajemen pendidikan: Suatu usaha meningkatkan mutu sekolah (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Ombak.